



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 832/IX/2014

II/SEPTEMBER 2014



DPR Akan Bantu Selesaikan Hak Masyarakat Jatigede



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA SEPTEMBER 2014

Kegiatan DPR-RI pada minggu kedua bulan September 2014 diisi dengan Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2013 dalam Rapat Paripurna, dan kegiatan Komisi VII DPR-RI.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Pengambilan Keputusan terhadap RUU Pertanggungjawaban APBN 2013 tanggal 4 September 2014

Pembicaraan Tingkat II didahului dengan Laporan Banggar DPR-RI tentang hasil Pembicaraan Tingkat I atas RUU Pertanggungjawaban APBN 2013. Dalam laporannya, Pimpinan Banggar mengatakan bahwa dalam pembahasan atas RUU ini, telah memperhatikan keputusan DPD-RI tertanggal 2 September tentang pertimbangan DPD-RI dan hasil telaahan Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) tertanggal 2 Juli 2014 terhadap laporan hasil BPK atas LKPP tahun 2013. Selanjutnya, Pimpinan Banggar Dr. IR. Djoko Udjianto, menyampaikan bahwa seluruh fraksi DPR-RI telah menyampaikan sikap akhir pada rapat ekraja di Banggar DPR-RI. beberapa diantaranya adalah, [1] Fraksi Partai Demokrat, berpendapat bahwa penyerapan anggaran dalam APBN 2013 masih mengalami kendala dalam merealisasikan kebijakan fiskal yang ekspansif. Untuk itu, pemerintah perlu memantapkan proses perencanaan anggaran, penyederhanaan dokumen pencairan anggaran dan pelaksanaan yang tepat waktu, sehingga APBN benar-benar menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional. [2] Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa politik pengelolaan anggaran, harus dilaksanakan dalam pemenuhan amanah konstitusi dengan mengkaitkan antara semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang negara dan dampak yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan rakyat. Juga meminta keseriusan dari pemerintah untuk melakukan perbaikan pengelolaan keuangan negara, terutama menyangkut dua permasalahan yang mempengaruhi kewajaran LKPP tahun 2013.

[3] Fraksi PDI-P berpandangan, pemerintah harus dapat



meningkatkan kinerjanya sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBN harus dikelola secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Serta Pemerintah harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan-temuan dari hasil pemeriksaan LKPP tahun 2013. [4] Fraksi PKS masih memberikan apresiasi atas kemajuan opini LKPP tahun 2013, meskipun belum mencapai WTP. Akan tetapi, pemerintah harus bertanggung jawab atas angka-angka yang disajikan dalam LKPP 2013 apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran hukum dan/atau penyajian informasi yang menyesatkan dalam LKPP 2013.

[5] Fraksi PAN memandang, sudah seharusnya pemerintah memiliki antisipasi yang baik, dengan perencanaan yang tepat, membuat kebijakan yang efektif, melakukan efisiensi terhadap belanja negara, sehingga persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh perlambatan perekonomian global bisa diantisipasi pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian, tidak mengganggu target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBN. Dengan pengalaman APBN 2013, fraksi PAN berharap pelaksanaan dan realisasi pencapaian target dalam APBN 2014 bisa lebih optimal.

[6] Fraksi PPP melihat bahwa dari hasil temuan BPK dalam LKPP 2013, kelemahan-kelemahan yang ditemukan sudah berlangsung dari tahun ke tahun sebelumnya. Seolah-olah tidak ada perubahan kemajuan signifikan. Ini menunjukkan bahwa fungsi otorisasi anggaran belum berjalan baik. Selain itu, agar pemerintah melakukan monitoring penyerapan

pan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi, ekonomis dan efektif dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sehingga sasaran pembangunan tercapai. [7] Fraksi PKB berpendapat bahwa dengan diaturnya ketentuan dimana Pemerintah wajib meningkatkan kualitas laporan keuangan, terutama terhadap K/L yang masih mendapat opini “tidak menyatakan pendapat” dan “wajar dengan pengecualian”, maka akan mendorong pemerintah untuk lebih baik lagi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan yang semakin baik di tahun berikutnya.

[8] fraksi Gerindra, berpendapat bahwa pelaksanaan APBN 2013 belum beranjak dari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Untuk itu, guna mendorong percepatan realisasi infrastruktur, pemerintah perlu mendorong reformasi birokrasi K/L agar daya serap K/L meningkat. Karena permasalahan utama lambannya realisasi pembangunan infrastruktur tersebut terletak pada rantai birokrasi pemerintah yang lamban dan tidak efektif. Para pemimpin di K/L harus berani melakukan transformasi dan gebrakan untuk mendorong program-program yang sudah ditargetkan. [9] fraksi Hanura menilai bahwa sejauh ini, pemerintah telah melakukan upaya perbaikan dan peningkatan dan penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, baik di sektor Migas, sosialisasi peraturan terkait, baik meliputi perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya.

BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP 2013 kepada DPR-RI, BPK memberikan opini “wajar dengan pengecualian” atas LKPP 2013. Opini LKPP 2013 masih sama dengan LKPP 2012. Permasalahan yang ditemukan BPK dalam LKPP 2013 sebanyak 32, terdiri dari Kelemahan Sistem pengendalian Internal sebanyak 23 masalah, dan Ketidaktepatan terhadap peraturan Perundang-Undangan sebanyak 9 masalah. Namun, penyebab utama opini WDP oleh BPK terhadap LKPP 2013 adalah permasalahan piutang bukan pajak dan permasalahan saldo lebih.

Dalam kesempatan ini, pemerintah mengatakan bahwa rekomendasi DPR menjadi dorongan positif untuk memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah berkomitmen melaksanakan kesepakatan dan rekomendasi DPR yang telah dimasukkan dalam RUU meliputi 6 poin, diantaranya: [1] agar pemerintah meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap kementerian negara/lembaga yang masih mendapat opini audit “Tidak Menyatakan Pendapat” dan “Wajar Dengan Pengecualian”. [2] agar pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas LKPP 2013 yang terdiri dari 23 temuan sistem pengendalian intern dan 9 temuan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. [3] agar pemerintah terus melakukan monitoring penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman kepada prinsip efisien, ekonomis,



dan efektif dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sehingga sasaran-sasaran pembangunan tercapai. [4] agar pemerintah melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM bagi pegawai di kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah. [5] agar pemerintah melanjutkan langkah-langkah dan upaya-upaya dalam penerapan akuntansi berbasis akrual secara bertahap. [6] agar pemerintah melanjutkan langkah-langkah penerapan statistik keuangan pemerintah yang mengacu pada manual statistik keuangan pemerintah sehingga dapat menyajikan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan antar negara.

Kegiatan Komisi VII DPR-RI

Pada tanggal 19 Agustus 2014, Wakil Ketua DPR Korinbang memimpin rapat Komisi VII DPR-RI dengan pokok pembahasan adalah penetapan Pimpinan Komisi VII DPR-RI. Rapat menyetujui dan menyepakati penetapan pimpinan Komisi VII yaitu: Ir. S. Milton Pakpahan, MM dari Fraksi Partai Demokrat nomor anggota 559 sebagai ketua Komisi VII DPR-RI, Zainudin Amali SE dari Fraksi Partai Golkar nomor anggota 238 sebagai Wakil ketua Komisi VII DPR-RI, Ir. H. Daryatmo Mardiyanto dari Fraksi PDI-P nomor anggota 355 sebagai Wakil Ketua Komisi VII dan H Achmad Farihal dari Fraksi PPP nomor anggota 295 sebagai Wakil Ketua Komisi VII. Pada 25 Agustus 2014, Komisi VII dipimpin Ketua Komisi Ir. S. Milton Pakpahan, MM melakukan rapat dengan mengambil agenda pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2013 pada kementerian ESDM atas laporan hasil pemeriksaan BPK. Rapat ini menyimpulkan dua hal, yaitu: Komisi VII menerima laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2013 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan memberikan apresiasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK dengan opini WTP, dan mendorong perubahan UU No 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar pendapatan migas dan panas bumi dicatatkan sebagai penerimaan kementerian energi dan sumberdaya mineral RI. ***

DPR Akan Bantu Selesaikan Hak Masyarakat Jatigede



Salah satu sisi Bendungan Jatigede

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR Muhidin M. Said berjanji akan membantu menyelesaikan hak masyarakat korban proyek Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Problem teknis konstruksi sudah 95% selesai, sementara problem utamanya masalah sosial hingga kini belum selesai. “ Pada tanggal 22 hingga 24 September Komisi V akan membicarakan anggaran 2015 dan mendiskusikan dengan KemenPU untuk mencari jalan keluar, termasuk masalah Bendungan Jatigede,” ujarnya kepada pers usai mengadakan pertemuan dengan pejabat PU dan Pemda Sumedang, serta wakil masyarakat di lokasi proyek Waduk Jarigede, Kamis (11/9)

Selama dua hari Rabu dan Kamis (10-11/9) Tim Kunker Spesifik Komisi V dipimpin Wakil Ketua Komisi Muhidin M. Said didampingi Roestanto Wahidi, Bambang Sutrisno, Jamaluddin Jafar, A.Bakri dan Andi Muawiyah Ramli melakukan peninjauan Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan Bendungan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat.

Muhidin mengatakan, berlarutnya penyelesaian terutama masalah sosial terkait Bendungan Jatigede ini tidak bisa dibiarkan, karena seluruh persoalan itu tujuannya sangat mulia untuk kesejahteraan rakyat. “Rakyat juga tidak bisa dirugikan. Karena itu rakyat juga dicarikan jalan keluar bagaimana hak-hak rakyat ini bisa diselesaikan

dungan 23 tahun kemudian (1986) dan ditindaklanjuti dengan beberapa study dan detail desain. Pada tahun 2004 di-review kembali hingga akhirnya pembangunan fisik sudah dilaksanakan. Konstruksi fisik waduk telah selesai dan ditargetkan pengisian waduk semula pada April 2014 dan mundur lagi pada September ini.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M. Said menerima proposal pengaduan dari tokoh masyarakat Sumedang

dengan baik,” tandas Muhidin

Proyek Bendungan Jatigede merupakan proyek terlama di dunia, digagas oleh Presiden Soekarno tahun 1963 dan disiapkan detail desain ben-

Manfaat Bendungan Jatigede antara lain akan mampu mengairi irigasi seluas 90.000 ha, menghasilkan air baku 3.500 liter/detik, menghasilkan PLTA 110 MW dan pengendalian banjir seluas 14.000 hektar. Problem sosial yang perlu segera diselesaikan menyangkut 11.400 KK terdiri sekitar 25.000 jiwa akan kehilangan perumahan, lahan pendapatan dan mata pencaharian.

Jadi lanjut Muhidin, itulah intinya kedatangan Tim Komisi V DPR ke lokasi Waduk Jatigede adalah untuk mengetahui persis apa masalah yang terjadi. Dengan hadirnya para pemangku kepentingan dan melakukan diskusi, dia optimis akan bisa menyelesaikan persoalan ini.

Langkah-langkah konkrit yang akan dibicarakan diantaranya masalah kehutanan, pemukiman, pembebasan lahan, termasuk pembangunan perumahan. Kebetulan masalah ini ada di lingkup tugas Komisi V. “Mari duduk bersama dan setiap masalah akan dibicarakan,” ujarnya lagi.

Ditegaskan politisi Partai Golkar ini,

rencana penggenangan yang dilakukan sebaiknya setelah pengosongan. Hak-hak rakyat harus diselesaikan dulu, baru dilakukan penggenangan, sebab tujuannya semua untuk kepentingan rakyat. “Boleh digenangi tapi hak-hak rakyat diselesaikan,” katanya.

Sebagai anggota DPR kata dia, akan mencari jalan keluar bagaimana agar

proyek ini selesai. Apalagi Jatigede merupakan target masa Kabinet SBY. Terkait dengan hal ini dia berharap dikeluarkan Keppres sebagai payung hukum untuk mencairkan uang negara yang akan dibahas dengan Kemendagri 22 September mendatang. DPR akan mendesak ganti rugi masyarakat yang terganggu proyek Jatigede harus diprioritaskan. (mp) foto: mastur/parle/hr.

DPRD Bandar Lampung Konsultasikan Penyusunan Tatib

Anggota DPRD Kota Bandar Lampung baru saja dilantik. Kini, aturan tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD sedang disusun. Agar Tatib tersebut tidak bertentangan dengan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), DPRD perlu berkonsultasi dengan Pimpinan DPR RI.

Delegasi DPRD Kota Bandar Lampung yang dipimpin Ketuanya Wiyadi, menemui Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo di ruang rapat Pimpinan DPR, Kamis (11/9), untuk mengkonsultasikan banyak hal menyangkut UU MD3. Seperti diketahui, UU ini juga mengatur keberadaan DPRD tingkat I dan II.

Dari penentuan Pimpinan Dewan, Pimpinan AKD, sampai *rolling* pimpinan yang biasa terjadi di DPR RI banyak ditanyakan oleh para anggota DPRD kepada Pramono. Menurut Pramono, ini tradisi yang baik, karena aturan apa pun yang dibuat di daerah tidak boleh bertentangan dengan UU yang telah disahkan di DPR RI. Ada hirarki perundang-undangan yang berlaku selama ini, yaitu UU berada di tangga



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung foto bersama DPRD Bandar Lampung

nomor dua teratas setelah UUD.

“DPRD Kota Bandar Lampung ke DPR RI ingin mempelajari tentang UU MD3 yang baru. Kebetulan mereka akan menyusun Tata Tertib DPRD Kota Bandar Lampung. Semua ini mengacu pada UU MD3. Dan menurut saya ini adalah langkah yang baik sebelum mereka menyusun Tatib,” tutur Pramono usai pertemuan tersebut.

Sebelumnya, DPRD Kota Bandar Lampung sudah mengirim banyak pertanyaan tertulis kepada Pimpinan DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Pramono menjawab satu per satu pertanyaan tertulis itu. Hampir semua fraksi di DPRD Kota Bandar Lampung hadir dalam pertemuan ini. Pramono sendiri didampingi Anggota F-PDI Perjuangan DPR RI dari Dapil Lampung I, Sudin. (mh) foto: iwan armanias /parle/iw.

Pilkada Tetap Harus Dipilih Langsung

Diskursus mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada kian menjadi polemik tajam. Selain tidak menghormati prinsip kedaulatan rakyat, Pilkada lewat DPRD juga membuka celah tindak pidana korupsi.

Demikian penegasan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo yang

ditemui usai menerima delegasi DPRD Kota Bandar Lampung di DPR, Kamis (11/9). Menurutnya, Pilkada lewat DPRD sangat bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Untuk itu, Pilkada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dipilih langsung oleh rakyat, bukan anggota DPRD.

“Kita telah sepakat bahwa ke-

daulatan ada di tangan rakyat dan rakyatlah yang menentukan. Bila sekarang ada keinginan mengembalikan kedaulatan ke DPRD tingkat II dan I, saya melihat berdasarkan pengalaman bahwa nanti peristiwa tindak pidana korupsi itu akan menjadi sangat banyak. Saya termasuk yang berpandangan bahwa kedaulatan itu tetap berada di tangan rakyat dan Pilkada



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung

harus dipilih langsung,” tandasnya.

Pramono mengungkapkan, buah dari Pilkada secara langsung adalah munculnya para pemimpin daerah yang betul-betul lahir dari rakyat. Sebut saja, Jokowi dan Ahok di Jakarta, Ridwan Kamil di Bandung, Risma Harini di Surabaya, dan lain-lain. “Harapan saya Pilkada tetap secara langsung atau bila tidak terselesaikan saat ini, presiden bisa menunda melalui Men-

teri Dalam Negeri dan dibahas oleh DPR berikutnya,”

Masih menurut Pramono, merumuskan RUU Pilkada sebaiknya tidak mengorbankan kepentingan rakyat dan kepentingan jangka panjang. Pihaknya juga yakin, MK akan menerima tuntutan pembatalan RUU ini bila masih memaksakan klausul pemilihan lewat DPRD. (mh) foto: iwan armanias/parle/iw.

RUU Advokat Akomodir Semua Stake Holder

Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Advokat DPR Nudirman Munir mengatakan Panitia Kerja (Panja) sangat berhati-hati dalam membahas RUU Advokat melalui upaya mengakomodasi aspirasi semua praktisi advokat.

“Polemik UU ini sudah lama. Sehingga Panja RUU ini sangat berhati-hati dan merupakan RUU yang paling banyak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat di 33 provinsi, akibat penegak hukum yang terlantar atau ditelantarkan,” kata Nudirman Munir dalam acara forum legislasi bertajuk ‘RUU Advokat’ di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9).

Selain Nudirman Munir, hadir juga sebagai pembicara, pengacara senior Frans Hendra Winarta, anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) Erman Umar dan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hassibuan.

Politisi dari Partai Golkar itu mengatakan, RUU Advokat sudah sekitar empat tahun digulirkan dan dalam dua tahun terakhir sudah dilaksanakan proses *hearing* (dengar pendapat) dan penyaringan aspirasinya. “Dalam sejarah saya sebagai anggota DPR, RUU inilah yang paling lama dengar pendapatnya, paling banyak proses aspirasinya. Kami sudah ke banyak universitas, ke Universitas Gadjah Mada, Universitas Hassanuddin, ke Universitas Udayana di Bali,” kata Nudirman.

Menurut Nudirman Munir, audiensi dengan *stakeholder* sebanyak



Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir didampingi para Advokat dalam Forum Legislasi

banyaknya guna mengakomodasi aspirasi para penegak hukum karena ada penegak hukum yang tidak mendapat perhatian dan terlantar. Selama ini, kata Nudirman, advokat disebut memiliki kedudukan setara tapi praktiknya ada ketidakadilan dan ketidaksetaraan.

“Karena itu, pembahasan RUU Advokat arahnya harus memiliki kepastian hukum untuk menegakkan keadilan yang sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, selama ini banyak advokat mengalami kesulitan sekadar untuk memperoleh informasi perkara yang dihadapi seorang calon klien. Jika advokat tidak memiliki informasi yang

jelas perihal perkara yang dihadapi seorang calon klien, kata dia, maka akan kesulitan untuk menangani perkaranya.

“Semangat RUU Advokat ini untuk menguatkan kewenangan dan fungsi advokat. Sama seperti wartawan, bahwa siapapun yang menghalangi kerja advokat bisa dituntut lima tahun penjara,” jelasnya.

Jika ada keluhan dari advokat yang merupakan anggota organisasi advokat, maka bisa mengadukannya ke Dewan Advokat Nasional (DAN). “Lembaga DAN ini merupakan lembaga yang akan dibentuk berdasarkan RUU Advokat setelah nantinya disetujui menjadi UU,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan, menolak RUU advokat pengganti undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat karena pihaknya bakal berada dalam kekuasaan pemerintah lewat pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN).

Menurut Otto Hasibuan, advokat dalam menjalankan profesi tidak boleh terikat. “Jadi kan advokat harus independen. Tidak boleh di bawah kekuasaan negara,” kata Otto.

Otto menuturkan, UU nomor 18 tahun 2003 merupakan berkah dari reformasi. Menurutnya, dengan adanya UU itu advokat setara dengan penegak hukum lain untuk menegakkan hukum. “Kalau RUU disahkan, advokat *downgrade*. Kami (advokat) bukan jadi setara penegak hukum, malah jadi banpol,” ujarnya.

Otto melanjutkan, jika RUU disah-

kan, advokat praktis di bawah pemerintahan. Menurutnya, jika pada saat advokat membela kepentingan masyarakat bertentangan dengan pemerintah maka akan dipersulit. “Kalau pemerintah tidak suka, kita tidak dikasih badan hukumnya,” tandasnya.

Di lain pihak, pengacara senior Frans Hendra Winarta menyambut baik rencana DPR yang akan mengesahkan RUU Advokat yang baru tersebut. Pihaknya membantah UU Advokat yang akan diberlakukan itu mencerminkan adanya campur tangan pemerintah karena akan ada lembaga Dewan Advokat Nasional (DAN) di dalamnya.

“Salah kalau dikatakan tak independen, justru yang ingin wadah tunggal itu adalah Orde Baru. Dulu itu serba dijadikan wadah tunggal supaya mudah mengendalikannya,” katanya.

Frans Winarta menambahkan, di

manapun di seluruh dunia, selalu ada keterkaitan negara dengan organisasi advokatnya, karena negara yang akan mengesahkannya. “Sudah saatnya profesi advokat diangkat kehormatannya, dengan adanya UU yang akan memungkinkan profesi advokat menjadi profesi terhormat, penuh kejujuran dan pejuang keadilan yang sesungguhnya,” ujarnya.

Senada dengan Frans Winarta, Anggota KAI Erman Umar juga menyambut baik rencana pemberlakuan UU yang baru tersebut. Pihaknya mengingatkan DPR agar DAN nantinya diisi oleh para tokoh hukum, akademisi dan wakil-wakil publik yang punya integritas tinggi. “Dari yang sembilan anggota nantinya, setidaknya enam diisi oleh para mantan pengacara, lainnya bisa dari perguruan tinggi dan wakil pemerintah,” katanya. (nt/sc/ foto:andri/parle/iw.)

Banggar DPR Bahas Anggaran 3 Kementerian Koordinator

Badan Anggaran DPR RI gelar rapat kerja dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM. Agenda utama raker adalah membahas pagu anggaran tahun 2015. Rapat berlangsung di ruang rapat Banggar, Gedung Nusantara II, Selasa (09/09).

Dalam paparannya, Kemenko Kesra mendapatkan anggaran sebesar Rp 231 miliar. Anggaran Kementerian yang dipimpin oleh Agung Laksono mengalami kenaikan, dari semula anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 218 miliar. Sementara, anggaran Kementerian Bidang Perekonomian mengalami kenaikan sebesar 1,94 persen. Di tahun 2014 anggaran Kementerian yang dipimpin Chairul Tanjung ini sebesar Rp 293 miliar, sedangkan di tahun 2015 ini, mendapat anggaran sebesar Rp 298 miliar.

Penurunan anggaran yang cukup signifikan terjadi di Kementerian Polhukam. Di tahun 2014, anggaran dipatok sebesar Rp 448 miliar. Namun, di tahun 2015 ini, anggaran Kementerian dipimpin oleh Djoko Suyanto ini mengalami penurunan sebesar 17,93 persen, menjadi Rp 367 miliar.

Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit sempat menilai, anggaran Kemenko dan Kementerian tidak ada yang mengalami penurunan, namun ternyata dalam realisasinya justru berkurang. Pasalnya, nota keuangan tahun 2015 bersifat *baseline*, sehingga tidak ada perubahan anggaran,

termasuk kementerian dan lembaga.



Pimpinan Banggar DPR RI

“Pada saat pemerintah mengajukan nota keuangan di Banggar, itu kan hanya *baseline*. *Baseline* itu diartikan tidak ada perubahan anggaran apalagi menurun di kementerian dan lembaga. Ternyata ada pengurangan anggaran,” jelas Ahmadi.

Politisi Golkar ini menambahkan, tugas kementerian yang mengkoordinasi berbagai kementerian harus efektif dan efisien. Untuk itu, kalau perlu dicover dengan biaya setimpal. Ia menilai, kelemahan dari pembangunan di Indonesia itu karena kurangnya koordinasi, sehingga banyak kegiatan yang *over lapping* antar kementerian dan lembaga.

“Selain itu, banyak program yg tidak fokus. Program di setiap kementerian atau lembaga tidak saling menunjang, melainkan berjalan sendiri-sendiri. Dampaknya kepada rakyat, berbagai program menjadi tidak tepat sasaran,” nilai Ahmadi.

Itulah yang menurut Ahmadi menjadi tugas Kemenko. Melakukan fungsi koordinasi antar kementerian dan lembaga, sehingga tercipta koordinasi yang semakin baik. Termasuk tugas Kemenko dalam pemerintahan yang baru nanti.

“Sangat perlu menyesuaikan de-

ngan pemerintah yang baru. Makanya programnya nanti kita bahas seperti apa untuk disesuaikan juga dengan pemerintahan baru. Jangan biarkan kementerian dan lembaga berjalan sendiri-sendiri,” imbuh Ahmadi.

Sementara itu, Anggota Banggar Achsanul Qosasi menilai wajar jika anggaran Kemenko tidak terlalu besar. Pasalnya, tugas utamanya hanya melakukan koordinasi. Berbeda dengan Kementerian atau lembaga yang langsung mengerahkan program-program teknis.

“Karena sifatnya koordinatif, wajar

saja anggaran tidak terlalu besar. Banggar tidak mempermasalahkan dan menyetujui itu. Namun, di pemerintahan baru nanti, Kemenko ini akan melakukan penyesuaian kembali, mengingat, kemungkinan ada kementerian yang dihilangkan,” tambah Achsanul.

Politisi Demokrat ini mengapresiasi terhadap serapan ketiga Kemenko ini. Rata-rata penyerapannya hampir 100 persen. Ia menilai penggunaan anggaran cukup efektif, sambil menyesuaikan apa yang akan dilakukan pemerintahan mendatang. (sf)/foto:andri/parle/iv.

DPR Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK

Dewan Perwakilan Rakyat kembali gelar uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) kepada calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Sebanyak 63 calon anggota BPK diuji, dimulai dari Kamis (4/9) lalu, dan diperkirakan akan selesai pada Kamis (11/09) minggu ini.

Anggota Komisi XI Dolfie OFP menyatakan, figur calon anggota yang dicari adalah calon yang memiliki pemahaman tugas dan pokok dari fungsi BPK. Namun, tetap ada poin lain yang bisa memberikan nilai lebih bagi calon anggota.

“Karakter calon anggota BPK yang dicari juga harus dapat melakukan terobosan dalam hal peningkatan kinerja BPK, termasuk ruang lingkup BPK dalam pemeriksaan keuangan negara. Sampai sejauh mana mereka (calon anggota) memahami hal itu,” jelas Dolfie di ruang rapat Komisi XI, Selasa (9/9).

Politisi PDI Perjuangan ini mengakui, jika penilaian hanya dari paparan masing-masing calon, dirasa masih kurang. Pasalnya, sebagian besar hanya mengambil materi dari isi UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK.

“Agak sulit menilai jika hanya dari pemaparan saja. Yang paling penting,



Anggota Komisi XI Dolfie OFP

justru pemahaman mereka tentang apa yang mereka tulis. Itu yang kita coba eksplorasi dari masing-masing calon Anggota BPK,” imbuh Dolfie.

Tantangan bagi calon anggota BPK ke depannya, tambah Dolfie, adalah audit kinerja. Ia menilai, BPK harus dapat melakukan kinerja terhadap keuangan negara yang berbasis

menyejahterakan masyarakat. Mengingat, anggaran yang bertujuan untuk masyarakat Indonesia harus benar-benar diterima oleh masyarakat.

“Selama ini, peran BPK dalam audit kinerja dirasa masih kurang. Keuangan negara itu harus menyejahterakan masyarakat. Misalnya program kesehatan, itu bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Kemudian program subsidi, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan harapan,” tambah Dolfie.

Selain itu, ia meminta dalam fungsi ke depannya, BPK harus lebih sering melakukan konsultasi dengan DPR. Bahkan, konsultasi perlu dilakukan kepada setiap Komisi di DPR, agar diketahui permintaan terkait audit terhadap mitra kerja dari masing-masing komisi.

Ke 63 calon ini bersaing untuk mendapatkan 5 kursi di Anggota BPK. Mengingat, pada September 2014 ini akan ada 5 (lima) anggota BPK yang akan mengakhiri masa jabatannya. Dan dua orang diantaranya memasuki masa purna bhakti yaitu Hadi Poernomo dan Hasan Bisri. Sebelumnya Komite IV DPD juga sudah merekomendasikan 25 nama calon, namun Komisi XI DPR tetap akan menguji 63 calon anggota BPK. (sf)/foto:iwan armianas/parle/iw.



DPR dan Parlemen Korea Selatan Bahas Pendidikan dan Industri Kreatif

Dewan Perwakilan Rakyat, melalui Komisi X, Rabu (10/9) menerima sejumlah Anggota Parlemen Korea Selatan yang dipimpin oleh Ahn Hang Joan. Pertemuan membahas seputar pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga. Mengingat, ini merupakan bidang kerja utama dari Komisi X. Kunjungan ini dalam rangka kunjungan balasan dari Parlemen Korsel, dimana sebelumnya DPR RI pernah berkunjung ke Korsel.

Ditemui usai pertemuan, Ketua Komisi X Agus Hermanto menyatakan, salah satu poin dari pertemuan adalah pertukaran pelajar antar kedua negara. Pasalnya, hubungan kedua negara dalam bidang pertukaran pelajar sudah terjalin cukup lama, dan terus mengalami peningkatan.

“Jika pertukaran pelajar ini memakan biaya tinggi, perusahaan swasta di Korsel siap memberikan beasiswa. Sehingga, lulusannya dapat bekerja di perusahaan tersebut. Jadi, pertukaran pelajar ini bukan hanya dibiayai oleh kedua pemerintah, namun juga melibatkan swasta. Tentunya banyak tenaga kerja terdidik Indonesia yang dapat bekerja di Korsel,” jelas Agus.

Politisi Demokrat ini menambahkan, hal lain yang menjadi bahan perbincangan adalah perfilman. Di Korsel, produsen perfilman diberikan kekhususan, yaitu pengurangan pajak dan investasi yang dibantu pemerintah. Perfilman merupakan industri yang potensial, sehingga diperlukan stimulan, agar film laku bukan hanya di lokal, tapi juga internasional.

“Kerjasama di bidang film juga dijalani kedua negara. Banyak film Indonesia yang syutingnya dilakukan di Korsel, begitupun sebaliknya. Ini merupakan hubungan yang baik, dan perlu ditingkatkan sehingga lebih baik lagi,” tambah Agus.

Ia mengakui, pariwisata dan industri kreatif Korea sangat maju dan dikenal di dunia. Ia menilai, Korsel sangat mencintai produk nasional, industri kreatifnya digarap dengan apik, sehingga sangat berkembang.



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto menerima cinderamata dari Anggota Parlemen Korsel

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi X Jefirston Riwu Kore. Ia menilai, industri kreatif Korsel bisa sangat berkembang karena ditopang oleh sumber daya manusia yang sangat baik, sehingga memiliki nilai jual yang tinggi.

“Kita berharap SDM Indonesia dapat dikembangkan lebih baik lagi, sehingga mampu bersaing di dunia internasional. Indonesia diuntungkan dengan sumber daya alam dan SDM yang sangat melimpah, sehingga dengan pengelolaan yang baik, dapat memberikan hasil yang signifikan. Kami yakin, Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain,” yakin Politisi Demokrat ini.

Apresiasi terhadap industri kreatif juga disampaikan oleh Anggota Komisi X yang lain. Pertemuan diakhiri dengan foro bersama dan pertukaran cinderamata oleh kedua parlemen. (sf)/foto:iwan armanias/parle/iw.

DPR Terima Aspirasi Pemerhati Pemilu

Sejumlah kelompok masyarakat dan LSM mendatangi DPR untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui mekanisme DPRD. Diterima di ruangan BURT DPR, Ketua Panja Rancangan Undang-undang Pilkada Abdul Hakam Naja menghormati aspirasi penolakan tersebut.

Hadir pada audiensi ini, diantaranya Perludem, *Constitutional and Electoral Reform Center (Correct)*, ICW, JPPR, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Populi Center,

Pattiro, dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel).

“Tentu saja kita menghormati perbedaan yang ada. Nantinya, pengambilan keputusan kalau tidak bisa muafak maka suara terbanyak. Kita belum tahu siapa yang menang. Namun realitasnya di Panja, memang ada yang menginginkan pilkada langsung, ada yang menginginkan melalui mekanisme DPR,” kata Hakam di Gedung Nusantara II, Senin (8/09).



Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja berjabat tangan dengan Direktur Eksekutif Perludem

Untuk itu. Tambah Politisi PAN ini, pihaknya telah merumuskan dua versi besar, yaitu pilkada langsung dan melalui DPRD. Terkait dengan masukan para kelompok masyarakat yang menolak Pilkada melalui DPRD ini, Hakam akan menyampaikan kepada panja dan pemerintah.

“Kami akan terus melakukan pertemuan untuk menuntaskan. Masukan yang ada, baik dari kelompok maupun

media, akan kami serap, dan inventarisasi berbagai masukan. Masukan itu kita sepakati, apakah masuk atau tidak. Masukan ini akan kami sampaikan kepada panja dan pemerintah,” tambah Hakam.

Politisi yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi II ini menambahkan, saat ini memang masih ada perbedaan pendapat di fraksi-fraksi DPR. Fraksi yang mendukung Pilkada langsung antara lain PDI Perjuangan, Hanura dan PKB. Sementara, fraksi pendukung pilkada tak langsung antara lain Gerindra, PAN, PKS, PPP, Demokrat, dan Golkar.

Namun, “Itu posisi pekan lalu saat rapat Panja. Rapat besok (Rabu) akan saya tanya lagi di rapat Panja. Jika berubah, ini akan berimplikasi pada perumusan,” imbuh Hakam.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyatakan pihaknya menolak pelaksanaan pilkada yang dilakukan melalui mekanisme DPRD. Jika dilihat dari unsur transparansi dan kredibilitas pilkada, jika pilkada dilaksanakan secara langsung, maka masyarakat bisa menagih janji dan membangun kontrak politik dengan calon kepala daerah. Sedangkan, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, dengan alasan apapun, masyarakat tidak dapat memberikan argumentasi apapun terhadap kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. (sf/ foto:iwan armanias/parle/iw.

DPR-Pemerintah Sepakat Selesaikan Revisi UU PA

Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah sepakat atas RUU Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002. Meski demikian dalam DIM (Daftar Inventaris Masalah) yang diketengahkan keduanya masih ada beberapa ketidaksepakatan. Hal tersebut menjadi inti dari Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Menteri Sosial di Senayan, Jakarta, Selasa (9/9).

“Pada dasarnya antara DPR dan pemerintah sepakat atas revisi UU Perlindungan anak No.23 Tahun 2002 yang merupakan inisiatif DPR. Dimana tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan paripurna kepada anak Indonesia. Dalam raker tadi ada perbedaan pendapat. Oleh karenanya pemerintah telah mengajukan 14 DIM Perubahan redaksional, 19 DIM Perubahan substansi dan beberapa DIM usulan tambahan,” ungkap Ketua Komisi VIII, Ida Fauziyah usai memimpin Rapat kerja dengan Pemerintah.



Ketua Komisi VIII DPR, Ida Fauziyah

Ida menjelaskan perubahan yang dimaksud antara lain adalah DIM nomor 14 yang mengetengahkan definisi anak. Dalam draft RUU yang diketengahkan DPR definisi anak adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan tanpa membedakan status perkawinan. Hal itu dimaksudkan bahwa melihat kenyataan di masyarakat ada seseorang yang masih tergolong usia anak namun sudah menikah. Itu

terap harus mendapatkan perlindungan.

Sementara itu pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari mengatakan bahwa mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres NO.36 Tahun 1990 tentang pengesahan *convention on the rights of the child*, definisi anak yang dimaksud adalah usia 0 sampai 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan. Sementara kalimat status perkawinan yang dimaksud tidak masuk di dalamnya.

“Bagi pemerintah untuk status perkawinan dan sebagainya itu sudah ada peraturan dan undang-undang yang mengatur. Jadi tidak perlu dimasukkan lagi dalam definisi anak di RUU Perubahan atas UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002,” jelas Linda.

Atas perbedaan pendapat tersebut, Komisi VIII dan Pemerintah sepakat

untuk membentuk Panitia Kerja (Panja). Dengan adanya Panja, menurut Ida pembahasan RUU ini akan terus berlangsung terus menerus. Oleh karena

itu pihaknya yakin bahwa RUU ini akan dapat diselesaikan dengan baik oleh DPR periode 2009-2014 ini sebagai kado atau hadiah bagi anak Indonesia

sebagai generasi penerus bangsa. (Ayu)/foto:andri/parle/iw.

Panja RUU LPSK Berdebat Soal Saksi

Sejumlah anggota Panja RUU LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) saling berbeda pendapat tentang kategori saksi yang perlu mendapat perlindungan. Pilihannya adalah segera mengakomodir hasil uji materi Mahkamah Konstitusi (MK) tentang definisi saksi atau menunggu revisi UU KUHAP.

“Iya ada perbedaan pendapat, bagi saya perubahan tentang definisi saksi itu bisa diterima tetapi sebaiknya dimulai dari RUU KUHAP yang juga sedang dibahas DPR karena KUHAP kan payung bagi semua undang-undang,” kata Harry Witjaksono usai rapat Panja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/14).

Politisi FPD ini menyebut hasil uji materi MK menyatakan definisi saksi diperluas pengertiannya tidak hanya orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri, tetapi setiap orang yang punya pengetahuan, yang terkait langsung terjadinya tindak pidana, wajib didengar sebagai saksi demi



Anggota Komisi III DPR Harry Witjaksono

keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka atau terdakwa.

Sementara itu anggota Komisi III dari FP Hanura Syarifudin Sudding bertahan dengan pendapatnya, dalam revisi UU no.13 tahun 2006 sudah sepa-

tutnya keputusan Hakim Konsitusuti itu diakomodir. Pilihan itu menurutnya akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi LPSK dalam menjalankan tugasnya.

“LPSK dapat memperluas perlindungan terhadap orang-orang yang dianggap punya kapasitas dalam memberikan kesaksian walaupun tidak mendengar atau melihat secara langsung. Ini sesuai dengan putusan MK dan itu telah dipraktekkan oleh KPK,” tandasnya.

Komisi III menargetkan dapat menuntaskan revisi UU no.13/2006 ini sebelum DPR periode ini menyelesaikan masa baktinya. Harry optimis sejumlah isu krusial akan dapat diselesaikan pada waktunya, diantaranya tentang pembentukan dewan pengawas LPSK dan soal akses perlindungan diri bagi komisioner dan petugas pendukung lainnya. (iky)/foto:andri/parle/iw.

Kompolnas Tidak Boleh Takut

Kisruh antara Polri dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) terutama dengan anggotanya Adrianus Meliala mendapat perhatian anggota DPR. Mereka meminta kondisi ini tidak membuat para komisioner yang mengawasi kinerja aparat kepolisian tidak ciut nyalnya.

“Kita dukung Kopolnas bekerja sesuai tupoksinya, jangan takut-takut, bisa *melempem* nanti. Kepolisian kalau tidak ada yang mengawasi ya bisa mandul dan akan rugi sendiri,” kata Imam Suroso anggota FPDIP DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/14).

Ia mengapresiasi keputusan para tokoh diantaranya Buya Syaifei Maarif, Irjen Pol (pur) Farouk Muhammad (mantan Gubernur PTIK), Suparman

Marzuki (Ketua KY) yang menegaskan tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan Adrianus. Wakil rakyat dari Dapil Jateng III menyebut lebih baik kasus tersebut diselesaikan saja di pengadilan.

Bicara pada kesempatan berbeda Anggota Komisi III Harry Witjaksono menilai tuntutan permintaan maaf Kapolri itu terkait karena struktur hukum Kopolnas yang jauh dari ideal. Tidak mungkin pengawasan bisa efektif kalau anggaran dan kantor Kopolnas masih numpang di kepolisian.

“Kopolnas mengawasi tapi dia masih berada di bawah ketiak yang diawasi, ya susah. Mengawasi Komes dibawah mungkin bisa efektif tapi kalau sudah menghadapi yang berbintang, berat,” ujar dia.



Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso

Pilihannya menurut politisi FPD ini adalah dengan memperkuat kewenangan Kopolnas lewat aturan perundang-undangan, kalau perlu membentuk UU tersendiri. Ia berharap langkah ini bisa dimulai dalam revisi UU Kepolisian yang saat ini sedang di-

lakukan Badan Legislatif.

Silang sengketa KOMPOLNAS dengan Polri dimulai ketika Adrianus dalam acara dialog di salah satu televisi

swasta mengatakan Bareskrim sebagai ATM Pimpinan Polri. Pernyataan itu membuat Kapolri murka dan memperkarakan ke pengadilan dengan dakwaan menghina penguasa atau badan

hukum. Kasus ini dihentikan setelah syarat permintaan maaf dipenuhi. (iky)/foto:andri/parle/iw.

Komisi IV Terima Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Aceh

Komisi IV DPR RI secara prinsip berpendapat sudah tidak ada masalah dengan perubahan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh, dan selanjutnya Komisi IV akan melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan untuk mengambil keputusan perihal permohonan persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) dalam revisi RTRW Aceh seluas 37.640 hektar (ha).

Demikian mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat, Senin (8/9) di Jakarta, antara Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Firman Subagyo (F-PG) dengan Gubernur Aceh sehubungan dengan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam RTRW Aceh yang masuk dalam perubahan kawasan hutan DPCLS yang telah disepakati oleh Gubernur dan seluruh Bupati dan Walikota di Aceh.

Menurut Firman Subagyo, hal ini menjadi penting karena ada wilayah yang telah existing dalam pembangunan untuk infrastruktur, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lainnya. Menurutnya, hal ini juga penting ketika *recovery* setelah terjadi bencana alam pada tahun 2004 yang lalu, sudah dibangun sekolah, perumahan dan fasilitas lain yang harus mendapat kepastian hukum.

“Jangan sampai nanti pembangunan-pembangunan dalam rangka untuk merecover musibah bencana dikemudian hari dianggap melanggar hukum,” kata Firman.

Dikatakan, kesepakatan Komisi IV. DPCLS dinilainya tidak begitu berarti dibanding luas hutan yang ada, sehingga Komisi IV bersepakat memberikan kepastian hukum. “Komisi IV sepakat usulan itu, dalam waktu dekat akan kita sahkan dan disetujui dalam rapat kerja dengan pemerintah untuk mendapat kepastian hukum,” tegasnya.

Perubahan kawasan hutan DPCLS, terdiri dari hutan lindung menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 35.010 ha, Suaka Marga Satwa Rawa Singkil menjadi APL 1.918 ha,



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo berdialog dengan Gubernur Aceh

Taman Buru Lingga Isaq menjadi APL 199 ha, dan Taman Wisata Alam Pulau Banyak menjadi APL seluas 513 ha.

Berdasarkan hasil penelitian tim terpadu terkait usulan Gubernur Aceh, disetujui perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 80.256 ha, terdiri dari seluas 42.616 ha tidak termasuk kategori DPCLS, dan seluas 37.640 ha yang BPCLS.

Luas kawasan hutan Aceh sebelum usulan perubahan seluas 3.405.062 ha (60,01%), maka luasan hutan Aceh setelah perubahan termasuk kategori DPCLS menjadi sebesar 3.351.268 ha (59,06%) atau terjadi perubahan kawasan hutan 0,95%.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengharapkan agar perubahan kawasan hutan dalam revisi RTRW dapat segera selesai, sehingga dalam melaksanakan pembangunan tidak menjadi kendala lagi. “Pemerintah dan seluruh rakyat Aceh berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama pola ruang hutan Aceh sudah mempunyai kepastian hukum, setelah persetujuan dari DPR RI dapat diselesaikan,” katanya. (as) foto:ry/parle/iw

Tim Panja Kelapa Sawit dan Karet Komisi VI Kunjungi PTPN XIV

Tim Panja Kelapa Sawit dan Karet Komisi VI DPR RI dipimpin Irmadi Lubis (PDIP) didampingi Erik Satrya Wardhana (Hanura), Pasha Ismaya Sukardi (PD), Yusyus Kuswandhana

(PD), Hayani Isman Soetoyo (PG), Emil Abeng (PG), Vanda Sarundajang (PDIP), Refrizal (PKS) dan Nanang Sulaeman (PPP) baru baru ini mengadakan kunjungan ke Provinsi

Sulawesi Selatan. Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan BUMN, khususnya PTPN XIV dalam bidang usaha pertanian/perkebunan dengan komoditi gula tebu, minyak kelapa sawit, kakao, karet dan kopra serta ternak sapi. Komoditi unggulan yang menjadi *core business* adalah gula, kelapa sawit dan karet.

Kunjungan Kerja dilakukan sebagai tugas pengawasan dan sebagai kontribusi Komisi VI terkait dengan pelaksanaan undang-undang, sejauh mana korporasi ini telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam pengawasan prosedur yang berlaku di sektor BUMN.

Komisi VI DPR secara spesifik ingin melihat bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN yang terkait dengan kekayaan negara, termasuk juga aset-aset yang ada di BUMN di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Makasar.

Seusai pertemuan dengan jajaran Direksi PTPN XIV, Ketua Tim Komisi VI Irmadi Lubis mengatakan, bahwa tujuan dari Kunker adalah untuk mengetahui kinerja keuangan, jumlah produksi dan luas lahan perusahaan baik inti maupun plasma.

Disamping itu juga mengawasi pelaksanaan kewajiban pemerintah di bidang industri, perdagangan, investasi, BUMN serta Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). "Termasuk sejauh mana nilai-nilai kemajuan baik dari deviden yang dicapai di perusahaan tersebut," ujar Irmadi.

Menurutnya, hal ini merupakan salah satu bentuk pengawasan dari dewan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk melihat dan memastikan sejauh mana pelaksanaan undang-undang berjalan dengan baik, agar tidak tumpang-tindih dengan Undang-undang lain. Tim Komisi VI ini selanjutnya akan mengadakan rapat bersama dengan Deputi dan Kementerian BUMN sebagai pembina.

"Kunker Panja Kelapa Sawit dan Karet ini diharapkan bisa memperoleh informasi secara langsung tentang perkem-



Tim Panja Kelapa Sawit dan Karet Komisi VI DPR berdialog dengan jajaran PTPN XIV, Sulsel

bangkan kinerja perusahaan dan anak perusahaan serta rencana-rencana strategis ke depan. Selain itu juga ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing BUMN dalam menjalankan fungsinya," harap Irmadi.

Informasi dari Direksi PTPN XIV menyebutkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi antara lain, beban hutang yang mencapai Rp 1,69 triliun berupa keterbatasan sumber pendanaan dan ekuitas negatif, sebagian besar tanaman kelapa sawit dan karet perlu *replanting* dan beberapa komoditi yang dikelola tidak *visible*.

Sementara itu program road map penyehatan PTPN untuk bangkit dan tumbuh antara lain pelunasan hutang, penyelesaian legalitas lahan dan penataan SDM. Selain itu rehabilitasi ekstensifikasi bisnis kelapa sawit dan karet serta membangun sistem, manajemen terpadu. (hindra), foto : eka hindra/parle/hr.

Baleg DPR Terima Usulan RUU Otonomi Khusus Papua

Badan Legislasi DPR (Baleg) menerima 1 usulan RUU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin dalam Rapat Kerja yang dipimpin Wakil Ketua Baleg, Ahmad Yani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/9)



Pimpinan dan Anggota Baleg DPR foto bersama usai menerima usulan RUU Otonomi Khusus Papua

“Mudah-mudahan dapat kita selesaikan bersama, apalagi ini menyangkut saudara kita dan bagian dari NKRI kita,” kata Yani.

Sesungguhnya pembahasan UU itu menurut Yani, jika semangatnya kita ingin menyelesaikan bisa cepat, bisa juga lama itu tergantung dari kita.

Dijelaskan Yani, bahwa Dewan tinggal memiliki waktu 16 hari lagi. Tapi jika bisa digunakan secara maksimal bisa melibatkan akselerasinya seperti 5 tahun. “5 tahun tidak akan ada artinya apabila kita tidak punya akselerasinya,” tukas Yani.

Dalam penjelasannya kepada Baleg, menurut Menkumham, Amir Syamsudin alasan mengusulkan RUU Otonomi Khusus Papua yaitu adanya tuntutan terhadap percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua yang

komprehensif, demokratis dan bermartabat.

Menurut Amir, UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua tidak dapat terlaksana dengan baik walaupun sudah berjalan kurang lebih 13 tahun.

Kata Amir, tanah Papua perlu dikelola dengan kewenangan yang diberikan lebih besar dari otonomi khusus yang telah ada, agar pembangunan Papua lebih intensif dan komprehensif dalam mewujudkan kemajuan dan kemuliaan masyarakat Papua yang baik dan damai.

Secara garis besar, terang Amir, RUU ini mencakup kewenangan pemerintah Papua yang diperluas di berbagai sektor yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota dan masyarakat adat, perlindungan dan pengakuan masyarakat adat Papua. (sc)/foto:naefurodji/parle/iw.

Komisi IV Dorong Petani Sulut Kembangkan Benih Lokal

Persoalan benih menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR dengan Walikota Tomohon Jimmy F Eman dan petani hortikultura dan florikultura di Desa Rurukan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Komisi IV mendorong agar petani dapat mengembangkan benih lokal.

“Masalah benih, sebaiknya petani meningkatkan kualitas benih lokal saja. Mengingat, benih dari luar belum tentu cocok ditanam di Tomohon. Benih yang sudah cocok itu ditingkatkan sedemikian rupa, agar menghasilkan produksi yang lebih baik,” ujar Ketua Tim Kunker Komisi IV Ibnu Multazam, usai pertemuan, baru-baru ini.

Politisi F-PKB ini menilai, kualitas benih lokal dirasa sudah baik. Pasalnya, memiliki kadar air yang sedikit, sehingga tidak mudah membusuk. Namun, ada beberapa catatan dari Politisi asal Dapil Jawa Timur ini.

“Di Tomohon, produk unggulannya wortel. Tampilan wortelnya sudah bersih. Cuma, ukurannya belum seperti wortel dari daerah lain. Kalau ukurannya bisa ditingkatkan sehingga mendekai kualitas wortel impor, tentu akan lebih baik jika kita bisa mengkonsumsi wortel lokal, tapi memiliki kualitas, besar dan penampilan setara wortel impor,” harap Ibnu.

Hal senada diungkapkan anggota tim kunker Siswono Yudo Husodo. Ia mengaku bangga dengan petani di Tomohon yang sudah menggunakan bibit lokal, daripada menggunakan bibit dari luar daerah. Tapi, ia meminta agar pengembangan terus ditingkatkan, mengingat, persaingan juga semakin ketat.

“Penangkar harus terus meningkatkan benih lokal, jangan



Ketua Tim Kunker Komisi IV DPR Ibnu Multazam saat pertemuan dengan Walikota Tomohon dan jajaran

berhenti di satu titik. Sementara *research* di tempat lain terus berjalan, maka kita bisa semakin jauh tertinggal. Sekali kita memproduksi benih, maka harus maju terus. Untuk itu, diperlukan dukungan dari pemerintah untuk memajukan kualitas dan kuantitas benih lokal di Tomohon, terutama wortel dan bunga krisan putih dan kuning,” harap Siswono.

Sementara itu, Walikota Tomohon Jimmy F Eman berharap, kunjungan kerja Komisi IV ini dapat meningkatkan produksi hortikultura dan florikultura di Tomohon. Harapan yang sama juga disampaikan para petani setempat.

“Kami berharap, Komisi IV dapat merekomendasikan apa yang menjadi harapan kami kepada pihak terkait, untuk mendapatkan bantuan, baik bantuan teknis maupun bantuan dari sisi pendanaan,” harap Jimmy. (sf)foto:sofyan/parle/hr.

Komisi IX Kembali Bahas Outsourcing BUMN

Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning menilai jika ada *Political Will* atau niat yang baik dari semua pihak tentu tidak ada yang sulit dalam menyelesaikan persoalan rakyat kita. Bahkan keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI dinilai Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini sebagai hal yang menghambat penyelesaian masalah.

Hal tersebut diungkapkannya di sela-sela rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Satgas *Outsourcing* BUMN, Jampidsus, Jamdatun dan Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (GEBER) BUMN, di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (8/9).

Permasalahan berawal dari adanya perusahaan BUMN yang menggunakan jasa *outsourcing*. Namun banyak karyawan di perusahaan BUMN tersebut yang tak kunjung diangkat menjadi pegawai tetap meski sudah puluhan tahun bekerja. Bahkan tidak sedikit yang dirumahkan atau dipecat.

“Sebenarnya jika ada *political will*



Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning

atau niat yang baik, semua persoalan rakyat dapat terselesaikan dengan baik. Apalagi BUMN yang semuanya ada di APBN. Tentu tidak rugi jika BUMN menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang ada,” jelas Ribka.

Ditambahkannya, karyawan BUMN itu seyogyanya bukan antara bos dengan pekerja saja, diantara mereka terikat konstitusional, yakni UU yang mengatur hubungan keduanya. Dan sesuai dengan Pasal 27, dimana

Negara atau pemerintah berkewajiban memberikan pekerjaan kepada Warga Negara dengan rasa aman dan nyaman. Bukan malah memecati tenaga kerja.

Ribka menilai seharusnya segala persoalan buruh bisa diselesaikan dengan baik di daerahnya masing-masing, dan tidak selalu harus ke Jakarta. Karena di daerahpun memiliki DPRD yang fungsi dan tugasnya tidak berbeda jauh dengan DPR RI. Namun lagi-lagi setelah ditelusuri, ada kepentingan di dalamnya.

Tidak hanya itu, dalam perjalanannya di dalam pemerintah pun kerap saling “melempar bola” terkait permasalahan tenaga kerja dan buruh. Sebut saja Kemenakertrans yang melempar ke Kemeneg BUMN. Padahal Panja *outsourcing* sudah memutuskan bahwa tidak boleh ada PHK, kalau mau keluar berikan hak-hak normatifnya, kalau direksi tidak bagus harus dipecat.

“Adanya Jampidsus disini jelas menghambat penyelesaian ini,” tegasnya. (Ayu)/foto:naefurodji/parle/iw.

Petani Tomohon Masih Membutuhkan Pembinaan

Walaupun pertanian di Kota Tomohon memiliki potensi yang cukup besar, namun para petaninya tetap harus mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Mengingat, petani di Tomohon masih ketinggalan informasi dibandingkan petani-petani di pulau Jawa.

“Mereka (petani Tomohon) masih jauh tertinggal untuk mendapatkan informasi. Mereka perlu banyak binaan untuk menambah wawasan tentang tata cara bertani. Belanda saja bisa ekspor tulip, kenapa kita tidak ekspor krisan, yang notabene menjadi andalan Tomohon. Bunga ini bisa dikirim ke berbagai daerah, bahkan bisa me-



Tim Kunker Komisi IV DPR meninjau lahan pertanian di Tomohon, Sulut

rambah pasar ekspor,” jelas Anggota Komisi IV Jonny Buyung Saragih, saat melaksanakan kunker di Kota Tomohon, Jumat (5/09).

Politisi Demokrat ini yakin, Tomohon mampu memaksimalkan potensi pertaniannya. Mengingat, Tomohon terletak di wilayah dingin dan subur. “Semoga mereka minimal bisa mencukupi kebutuhan lokal, terutama di Sulawesi, baru kemudian ke pulau sekitarnya, dan baru kemudian ke pasar ekspor,” imbuh Jonny.

Sementara itu, Anggota Komisi IV Mohammad Jafar Hafsa menilai, dukungan Kementerian Pertanian kepada para petani Tomohon sudah cukup baik. Namun, masih dibutuhkan pembinaan dari Kementan untuk

menstimulus agar petani semakin aktif memproduksi produk pertanian.

“Pemda dan Pemprov juga harus selalu mendampingi. Petani juga jangan terlalu mudah meminta bantuan kepada pemerintah. Petani harus membentuk kelompok usaha atau koperasi. Sehingga dapat bersama-sama memasarkan produknya secara kolektif,” imbuh Jafar.

Politisi Demokrat ini menilai, potensi bunga yang dimiliki oleh Tomohon harus disosialisasikan secara kontinyu. Sehingga, akan tercipta pasar dari produk bunga, dan berimbas kepada kesejahteraan petani bunga.

“Yang lebih penting adalah konsumsi bunga harus meningkat, jadi harus kita

promosikan dan sosialisasikan. Bunga bisa disosialisasikan di acara-acara daerah, kawasan kantor, ataupun lainnya, dan harus menggunakan bunga segar. Dengan begitu, permintaan bunga akan meningkat, konsumsi juga akan meningkat, selanjutnya produksi dan harga bunga akan semakin bergairah,” imbuh Jafar.

Pada tahun 2013, Kota Tomohon telah memproduksi bunga potong sebanyak 4,6 juta tangkai. Meningkat lebih dari 430 persen dibanding tahun 2012 yang hanya 882 ribu tangkai. Luas panen juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, hanya seluas 58 hektar pada tahun 2012, dan meningkat menjadi 232 hektar pada tahun 2013, atau meningkat lebih dari 300 persen.

(sf) foto: sofyhan/parle/hr.

Pimpinan Baleg Usulkan Take Over Pembahasan RUU

Masih rendahnya capaian legislasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 yang sudah ditetapkan DPR secara bersama-sama, yaitu 68 RUU, sementara waktu masa bhakti keanggotaan DPR periode 2009-2014 akan segera berakhir tanggal 30 September 2014 kurang lebih tinggal 16 hari kerja lagi.

Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) telah menyampaikan usulan penanganan RUU yang masih dalam tahap Pembicaraan Tingkat I dapat dilanjutkan oleh Keanggotaan Dewan periode berikutnya (2014-2019) dengan catatan tidak semua RUU dapat dilanjutkan dengan berbagai pertimbangan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Baleg, Ahmad Yani terkait Evaluasi Penanganan RUU terhadap Pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 saat Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/9)

“Usulan ini merupakan terobosan karena selama ini tidak dikenal luncuran atau take over pembahasan RUU pada setiap pergantian periode keanggotaan Dewan,” terang Yani.

Yani menjelaskan, luncuran tersebut



Wakil Ketua Baleg Ahmad Yani berdialog dengan Pemerintah

merupakan upaya agar program yang sudah ditetapkan bersama dapat dicapai pada akhir periode DPR 2009-2014 atau setidaknya mencapai 50% dari program RUU yang ada.

Namun, tegas politisi PPP tersebut, hal ini tentunya dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh semua pihak terkait khususnya di lingkungan DPR dan pemerintah. Serta diberikan landasan hukum dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib yang saat ini sedang dibahas di Pansus DPR.

Sebelumnya Yani menyampaikan perkembangan pencapaian Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 yaitu 15 RUU telah disahkan menjadi UU termasuk di dalamnya RUU komulatif terbuka, 39 RUU dalam proses pembicaraan Tingkat I, 4 RUU menunggu Surat Presiden, 1 RUU proses Pengambilan Keputusan sebagai RUU Inisiatif DPR, 4 RUU proses harmonisasi di DPR, dan 14 RUU masih dalam proses penyelesaian di DPR dan Pemerintah. (sc)/ foto:naefurodji/parle/iw.

Kasus JIS Harus Terbuka

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Jakarta International School (JIS) diharapkan bisa terbuka dan tidak ada tendensi ditutup-tutupi, karena melibatkan pihak asing. Orang yang bersalah harus dihukum. Tapi, jangan sampai kasus ini menghukum orang yang tidak bersalah.

Demikian penegasan Anggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat (F-Gerindra) usai mengunjungi para tersangka kasus JIS di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta, Kamis (4/9). Ada 4 dari 5 tersangka kasus JIS yang ditahan di Rutan Cipinang. “Kita ingin agar kasus ini bisa lebih terbuka. Dan orang yang harus bertanggung jawab melakukan perbuatan bejat terhadap anak-anak kecil itu harus betul-betul bisa kita bawa ke depan pengadilan,” tandas Martin.



Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat

Sejak kasus ini mencuat, Komisi III DPR pun ikut menggali banyak informasi dengan membentuk Panja JIS. Komisi III, lanjut Martin, merasa berkepentingan mengetahui duduk

persoalan ini lebih dalam karena telah menyita perhatian masyarakat luas. “Kami ikut merasa iba terhadap anak-anak kita yang diperlakukan demikian di sekolah yang bertaraf internasional. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini yang bisa merusak masa depan anak-anak kita.”

Martin berharap, penyidikan kasus ini jangan sampai menysar orang yang tidak bersalah. Untuk itulah, butuh keterbukaan atas pengungkapan kasus JIS tersebut. “Kasus ini menyita perhatian publik bukan hanya orangtua, tetapi juga di dunia internasional. Orang yang melakukan itu harus bisa ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Tetapi, jangan sampai salah orang,” kilahnya, mengakhiri wawancara. (mh)/foto:husen/parle/iw.

Ketua DPR Berharap Calon Anggota DPR Mendatang Tanggalkan Warna Warni

Ketua DPR RI Marzuki Alie berharap Anggota DPR RI periode 2014-2019 dapat lebih memahami wawasan nusantara dan kebangsaan, sehingga ketika bertugas sebagai anggota parlemen menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terkotak-kotakan, meskipun anggota parlemen berasal dari partai atau fraksi yang berbeda-beda.

Hal tersebut diungkapkan Marzuki Alie usai menutup pembekalan dan pemantapan pemimpin Tingkat Nasional Anggota DPR RI gelombang kedua, Jumat (5/9) di Lemhanas, Jakarta.

Ditambahkannya, dengan adanya pembekalan tersebut yang merupakan pertama kalinya diselenggarakan, Marzuki yakin DPR ke depan akan lebih baik, dan lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai, golongan atau kelompok.

“Saat periode saya dulu, tidak ada pembekalan dan pemantapan di Lemhanas. Tidak seperti sekarang yang mendapat pembekalan, pemantapan sehingga ke depan akan lebih memiliki



Ketua DPR RI Marzuki Alie memberi ucapan selamat kepada Anggota Baru

kesamaan visi dan misi dalam menjalankan fungsi dan tugas seorang legislator. Dengan demikian diharapkan anggota periode mendatang dapat lebih baik dari periode sebelumnya. Bersedia menanggalkan warna-warni bajunya, dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa, negara dan

rakyat di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan,” kata Marzuki.

Pembekalan ini menurut Marzuki sangat bermanfaat, baik bagi calon anggota DPR RI yang baru saja terpilih, maupun anggota DPR RI incumbent alias yang terpilih kembali. Menurut-

nya, bagi anggota DPR yang baru dan belum memiliki pengalaman dalam memahami tugas dan fungsi DPR, terutama dalam menyusun sejumlah undang-undang yang termasuk dalam fungsi legislasi, pembekalan oleh Lemhanas ini tentu sangat berguna.

Sementara bagi anggota DPR incumbent yang notabene sudah berpengalaman dan sudah teruji wawasan kebangsaannya, adanya pembekalan ini juga cukup bermanfaat untuk kembali menyamakan pemahaman dan persepsi atas tugas dan fungsi DPR mendatang.

Akhirnya, kepada 66 orang calon anggota DPR RI periode 2014-2019 yang masuk dalam gelombang kedua pembekalan dan pematangan Pemimpin Tingkat Nasional di Lemhanas ini, Marzuki mengucapkan selamat, disusul penyematan PIN dari Lemhanas. (Ayu)/foto:ayu/parle/iw.

DPR Dorong PTPN XIII Produksi Bio Solar



Tim Panja Kelapa Sawit dan Karet Komisi VI DPR berdialog dengan jajaran PTPN XIII Pontianak

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terus membengkak dari tahun ke tahun. Tahun ini diprediksi subsidi BBM bisa tembus dikisaran 125 Triliun. Untuk menekan besarnya angka subsidi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk “mengoplos” solar dengan CPO (*Crude Palm Oil*) dengan komposisi 6-10%. Indonesia sebagai produsen CPO terbesar kedua di dunia, tentu kebijakan ini patut didukung oleh para pemangku kepentingan, termasuk PTPN XIII yang memproduksi CPO dengan kebun kelapa sawit yang tersebar di wilayah Kalimantan.

Hal tersebut dikemukakan Sugihono Kartosuwondo (FPKS) anggota Panja Kelapa Sawit dan Karet Komisi VI DPR saat berdiskusi dengan jajaran PTPN XIII di Kantor Pusat, Pontianak baru-baru ini. Lebih lanjut Sugihono mempertanyakan sejauhmana PTPN XIII dilibatkan dalam program konversi CPO dengan solar menjadi Bio Diesel.

“Apakah PTPN XIII sudah dilibatkan oleh Pertamina dalam pengadaan BBM Bio Diesel bersubsidi? Disini seharusnya Meneg BUMN berperan untuk mengatur kerjasama interkoneksi antara Pertamina dengan PTPN, jikaalaupun kendalanya soal biaya produksi, disitu ada dana subsidi BBM yang seharusnya bisa dimanfaatkan dan jumlahnya cukup besar,” ujar Sugihono.

Lebih lanjut politisi PKS ini menyayangkan lambannya kinerja Meneg BUMN dalam mengatur kerja sama antar BUMN terkait ketersediaan bahan baku Bio Diesel. Padahal menurutnya, dalam rapat-rapat di komisi lain (Komisi VI) Pertamina sudah mengalokasikan harga kisaran Rp.2000/liter untuk bahan baku Bio Diesel. “Lalu selama ini dari mana Pertamina mendapatkan bahan baku Bio Diesel tersebut jika PTPN tidak dilibatkan,” tanya Sugihono.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PTPN XIII Nur Hidayat menjelaskan bahwa pihaknya sewaktu menjabat di PTPN III pernah difasilitasi Meneg BUMN untuk menjalin kerja sama dengan pihak PLN terkait program konversi BBM dari minyak nabati (CPO).

“Sebagai tindak lanjutnya kami memproduksi *Pure Palm Oil* (PPO) yang khusus untuk dikonversi menjadi Bio Diesel. Kami sudah memiliki 2 unit khusus memproduksi biodiesel dengan kapasitas 20.000 liter/hari tiap unitnya. Namun kami terkendala dengan biaya produksi yang tinggi sehingga harga jual PPO justru lebih mahal dibanding CPO, karena itulah PLN tidak berani membeli,” ungkap Nur.

Nur Hidayat menambahkan, program Bio Diesel bisa berjalan jika pada saat harga CPO sedang turun seperti sekarang, namun bisa kembali terhenti (*off*) ketika harga CPO naik. Pihaknya juga mengakui jika BUMN yang memproduksi CPO (PTPN) hanya mampu mensuplai 10% kebutuhan pasar, selebihnya 90% masih dikuasai swasta. (odjie)/foto:naefurodji/parle/iw.

Komisi VI Belum Sepakat Kucurkan 1,5 Triliun ke PT PAL

Dalam kunjungannya ke PT PAL (Persero), Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/9), sejumlah anggota DPR yang duduk di Komisi VI dan tergabung dalam tim Panja Aset BUMN mengakui

bahwa peranan industri strategis harus dikembangkan. Apalagi sudah ada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri strategis.

Menurut Ketua Komisi VI dari F-PG yang juga ketua Tim Kunker Panja Aset - aset BUMN Airlangga Hartarto, dalam RAPBN Perubahan 2014 pemerintah melalui Kementerian Keuangan



Tim Kunker Panja Aset-aset BUMN meninjau PT PAL Surabaya

sebagai fasilitas pembuatan kapal selam untuk Kementerian Pertahanan. Kementerian ini membeli tiga kapal selam dari perusahaan swasta Korea, yang dua dibuat di Korea dan yang satu di buat di Indonesia serta diminta untuk membuat fasilitas itu.

Oleh karena itu PT PAL (Persero) meminta fasilitas itu dengan nilai 2,5 triliun dibagi dalam dua tahun dan perusahaan ini masih punya kewajiban seperti hutang jangka panjang yang jumlahnya menurut audit cukup besar. Dia mempertanyakan apakah layak penyertaan modal negara (PMN) ini.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menegaskan, DPR ingin mendalami lebih detail terkait pemberian PMN untuk membangun fasilitas kapal selam. Pembahasan PMN untuk kapal selam bakal digelar lagi dalam wujud rapat pendalaman dengan manajemen PT PAL dan Kementerian BUMN." Pembahasan PT PAL agar dilengkapi datanya. Termasuk dana PMN masa lalu untuk apa," sebutnya. (Andri)/foto:andri/parle/iw.

mengalokasikan anggaran senilai 1,5 triliun untuk PT PAL (Persero). Anggaran tersebut bukan untuk modal kerja, namun untuk menjalankan misi pembangunan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) berupa pembuatan kapal selam yang di produksi oleh

Indonesia.

Anggota Komisi VI Azam Azman Natuwijana menjelaskan PT PAL (Persero) itu meminta penyertaan modal negara untuk tahun 2015 sebesar 1,5 triliun dan 2016 sebesar 1 triliun digunakan

Ruang Fiskal APBN Harus Diupayakan Lebih Leluasa

Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Mohamad Sohibul Iman memberikan pembekalan kepada Anggota Parlemen Periode 2014-2019 terkait Pembahasan APBN. Tantangannya adalah APBN harus sehat dan kesehatannya dilihat dari ruang fiskal.

"RAPBN 2015 yang ada sekarang ini ruang fiskal sangat sempit. Oleh karena itu harus diupayakan bisa lebih leluasa," kata Sohibul Iman, Pimpinan DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kamis (4/9), di Gedung Lemhanas, Jakarta.

Menurutnya, masalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2015 masih bersifat base line, artinya masih diberikan kesempatan kepada Presiden Republik Indonesia (RI) terpilih Joko Widodo untuk melakukan perubahan-perubahan.

Terkait dengan subsidi yang sudah diajukan oleh Pemerintah, ungkapnya,

kalau nanti punya *political will* yang lain bisa diubah. Jadi nanti diawal tahun pada pembahs APBN-Perubahan bisa diajukan perubahannya.

Memang semua konsen bahwa persoalan subsidi harus dipikirkan bersama. "Subsidi sudah kebesaran, dan yang perlu diperhatikan dan dicari jalan keluarnya selama ini subsidi tidak tepat sasaran," kata Sohibul.

Selanjutnya, ia menerangkan pada Undang-Undang tentang APBN Tahun 2014, ada klausul yang memberikan keleluasaan kepada Pemerintah untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) karena disadari bahwa komoditas strategis itu perlu dinaikkan.

Tetapi masalahnya, sisa waktu ini pemerintahan sekarang ini tepat atau tidak, sebab kalau tidak tepat waktunya menimbulkan inflasi yang besar sekali. "Menurut saya memang kita harus



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman

sama-sama mencari waktu yang tepat itu. Biasanya waktu yang pas itu bisa April atau Mei," kata Sohibul.

Yang dilakukan kepada Pemerintahan ke depan, jika Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak menaikkan harga BBM, maka Joko Widodo bisa menaik-

kan. “Bisa menaikkan kalau kalkulasinya memang harus dinaikkan, atau juga bisa melakukan realokasi anggaran program yang ada sekarang,” tegasnya.

Namun katanya, jika tidak mau menaikkan, pemerintahan selanjutnya harus mencari penambahan pendapatan diantaranya dengan mengefektifkan,

mengefisienkan, dan mengoptimalkan pajak. (as)/foto:rizka/parle/iw.

DPR Jangan Menjauhi Pers



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengingatkan terlepas dari dinamika pemberitaan yang sering menyudutkan, anggota dewan sebaiknya tetap menjaga hubungan baik dengan media. Bagaimanapun pemberitaan pers dapat menjembatani hubungan parlemen dengan masyarakat.

“Jangan jauhi pers meskipun kadang kala bikin kita sakit perut karena pemberitaan yang kritis, kadang diluar batas keadilan. Pers sendiri kita juga minta hati-hati jangan menggunakan kewenangan untuk hal-hal yang kurang produktif,” katanya saat menyampaikan pembekalan untuk Anggota DPR Periode 2014-2019 di Lemhannas, Jakarta, Kamis

(11/9/14).

Baginya parlemen dan media seperti fenomena simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Survey yang dilakukan sejumlah lembaga menunjukkan DPR adalah institusi yang paling banyak diliput media. Itulah sebabnya dalam pembekalan materi tentang Membangun Hubungan dengan Media perlu disampaikan.

Dalam kesempatan itu politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyampaikan masukan kepada insan media. “Kritikan saya pers sekarang banyak yang terjebak pada industrialisasi, ada juga yg terjebak pada rating media, masalah mistis, gosip, seks dan seterusnya. Ini perlu ditingkatkan supaya pemberitaan untuk masyarakat lebih baik,” tegasnya.

Hamdani anggota DPR terpilih dari Partai Nasdem berharap, pers dapat memilah pemberitaan dengan lebih berkeadilan. “Kita harapkan media jangan men-generalisir karena saya yakin ada hal positif dari anggota dewan,” ungkapnya.

Pada bagian lain Elviana yang sebelumnya anggota DPD RI menyoroti tidak berimbang pemberitaan media untuk DPR. “Banyak program bagus dihancurkan oleh media ini tentu perlu diperbaiki. Contoh lain sebagai perbandingan anggota DPD juga punya program kunjungan ke luar negeri tapi saya lihat tidak pernah disoroti media,” pungkask dia. (iky) foto: odjie/parle/hr.

Penyimpangan Aset BUMN, Harus Dipidana

Panitia Kerja - Panja Aset BUMN Komisi VI DPR RI siap menindaklanjuti temuan pelepasan aset negara yang tidak sesuai aturan perundang-undangan. Sejumlah langkah akan diambil termasuk meminta aparat terkait memperkarakan secara pidana penyimpangan yang terjadi.

“Penyimpangan itu tentu kita bisa minta diselesaikan secara pidana karena disini kita lihat ada pelanggaran serius dalam menangani aset BUMN,” kata anggota panja Muhammad Azhari usai melakukan kunjungan lapangan di lahan PTPN II yang diserobot pihak-pihak tidak bertanggung jawab di Medan, Sumut, Rabu (3/9/14).



Panja Aset BUMN Komisi VI DPR saat pertemuan dengan jajaran PTPN II Sumut

la menjelaskan dalam tugas pengawasannya panja telah mendalami sejumlah laporan dugaan penyimpangan pelepasan aset pada perusahaan plat merah seperti PT Telkom yang menjual anak perusahaan Telkom Vision, PT Djakarta Dloyd, PT Sandang dan Hotel Indonesia Nature.

“Kita sudah periksa Telkom saat melepas aset Telkom Vision, kita sudah larang melakukan penjualan tapi kok masih dijual, Hotel Indonesia Nature juga melepas aset dimana sekarang telah berdiri Hotel Kempinsky dan Grand Indonesia sangat besar itu,” tandasnya.

Dalam kunjungan tersebut Tim Panja yang dipimpin oleh Lili Asdjuredja

menjelaskan kedatangan ke PTPN II perlu dilakukan untuk mendalami persoalan nyata yang terjadi di lapangan. Langkah pengawasan yang dilakukan dewan berdasarkan pijakan hukum jelas diantaranya UU no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Kita perlu mendalami aset-aset yang sudah berpindah tangan dari PTPN. Kita minta dirut terbuka menyampaikan permasalahan,” tutur politisi FPG yang juga Sekretaris Panja Aset BUMN ini.

Sementara itu Dirut PTPN II Bhatara Moeda Nasution menjelaskan saat ini sedang mengupayakan membangun kawasan mandiri Kota Deli Megapo-

litan di atas lahan seluas 8.200 hektar. Proyek ini direncanakan bekerja sama dengan pengembang Ciputra. Namun kendala muncul sebagian lahan yang berada di jalur utama menuju Bandara Internasional Kualanamun ini sudah dikapling pihak-pihak tertentu.

“Sebagian lahan yang akan dikembangkan untuk membangun Kota Deli ini sudah dikuasai pihak tertentu, termasuk rakyat yang sudah mulai memagar dengan pagar beton. Diperkirakan yang memagar bukan rakyat tapi pengusaha yang mendompleng,” ujarnya. Ia juga mengaku sudah melaporkan kondisi ini sampai kepada Komisi II dan Presiden SBY. Sejauh ini menurutnya belum ada solusi nyata. *(iky) fotoical/parle/hr*

Juara Dunia Karate Junior Almino Harumkan Nama Bangsa



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyaksikan laga pemenang medali emas karateka cilik

Satu lagi atlet nasional telah mengharumkan nama bangsa lewat Kejuaran Karate Pelajar Dunia. Almino Pesiwarissa meraih medali emas untuk nomor kumite di bawah usia 12 tahun. Atlet cilik berdarah Ambon tersebut mengalahkan karateka dari Jerman di final dengan skor 3-0.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Selasa (9/9), di ruang kerjanya menerima langsung kedatangan Almino yang didampingi keluarga dan pengurus Lemkari. Sebagai Ketua PB Lemkari, Priyo menyatakan bangga dan bahagia atas prestasi yang diukir putra Ambon tersebut. “Hari ini saya betul-betul bangga dan gembira, anak kita dari Maluku Almino mendapat medali tingkat dunia untuk kelas junior,” tuturnya usai menerima Almino dan keluarganya.

Almino sendiri adalah siswa kelas 4 SD Xaferius C Ambon. Ia sudah berlatih karate sejak usia 7 tahun. Almino memang lahir di tengah keluarga karateka. Ayahnya, Deny Boke Pesiwarissa juga adalah karateka. Bahkan, kakeknya pun, BM Sa-

man, juga mantan atlet karate. Saat bertemu Priyo, Almino membawa piala juara dunianya bertuliskan “5th Basel Open Masters 2014. 1st Prize Kumite”. Di hadapan Priyo, Almino juga mendemonstrasikan gerakan-gerakan karate.

Karena ada putra Maluku yang menjadi juara dunia karate, tentu ini sangat membanggakan dan mengharumkan pula nama daerah. Bahkan, Priyo langsung menelepon Wakil Gubernur Maluku yang juga Ketua Pengurus Daerah Lemkari untuk menerima dan mengarak Almino saat tiba di Kota Ambon nanti. Rencananya, Almino pulang kampung pada 13 September. Almino telah melewati seleksi ketat dari sejak di SD, lalu ke kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Sebagai juara nasional, Almino adalah satu-satunya yang diutus PB Lemkari ke kejuaraan dunia di Swiss tersebut. Sebelum berangkat ke Swiss, ia berlatih terlebih dahulu melalui training centre di Cisarua, Bogor. Saat ini, Almino menyandang ban coklat di Lemkari.

“Saya sebagai Ketua Umum Lemkari bangga, karena anak-anak didik kita di tingkat SD sudah mengharumkan Tanah Airnya. Bendera pusaka dan lagu kebangsaan kita dinyanyikan di Swiss. Saya sudah telepon Wakil Gubernur Maluku, agar saat mereka tiba di bandara nanti disambut dengan arak-arakan. Ini merupakan kebanggaan bagi Maluku juga,” ungkap Priyo.

Lemkari, lanjut Priyo, sering sekali mengirim atlet-atletnya ke kejuaraan dunia karate. Dan para pengurus Lemkari kerap dibuat tercengang melihat prestasi para karateka junior sering sekali menjadi juara dunia. “Ini adalah bibit hebat yang harus kita semai dan kita dorong terus untuk berprestasi. Prestasi kali ini harus menjadi inspirasi bagi munculnya atlet-atlet lainnya,” harap Priyo. *(mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.*

Panja RUU Advokat Terima Usulan Penolakan

Perdebatan sengit seputar keberadaan RUU Advokat yang sedang dibahas oleh Panja RUU Advokat Komisi III DPR, terus mengalir. Panja telah menerima banyak masukan dari berbagai organisasi advokat, baik yang menerima maupun yang menolak pengesahan RUU ini.

Ketua Panja RUU Advokat Syarifuddin Suding (F-Hanura), secara bergiliran menerima kelompok yang menolak dan menerima RUU Advokat, Kamis (11/9) di DPR. Kelompok yang menolak RUU Advokat dipimpin Ketua Delegasinya Leonard Saut Panahatan Simorangkir, menyampaikan banyak aspirasi dengan berbagai argumennya. Kelompok yang menolak di antaranya HAPI, IKADIN, IPHI, HKPN, dan lain-lain.

Puluhan advokat secara bergantian menyampaikan pandangan penolakannya atas RUU Advokat tersebut. Dalam argumennya, delegasi ini menyampaikan, RUU ini akan berdampak langsung pada organisasi Peradi sebagai organisasi induk advokat. Peradi saat ini sedang melakukan pembenahan internal. Bila RUU ini disahkan, berarti secara tidak langsung DPR mengganggu pembenahan Peradi.

Peradi, lanjut para advokat lagi, adalah aset negara, bahkan menjadi percontohan organisasi Advokat ASEAN. Mereka khawatir bila RUU Advokat disahkan, Peradi akan ikut hancur. Kelompok advokat yang menolak ini, menyatakan, sudah merasa nyaman dengan UU Advokat yang lama, yaitu UU No.18/2003.

Menanggapi aspirasi para adovokat yang menolak tersebut, Ketua Panja RUU Advokat Syarifuddin Suding, menjelas-



Pengacara yang menolak RUU Advokat

kan, usulan perubahan RUU ini sudah masuk ke Badan Legislasi (Baleg) DPR setahun lalu. Dari Baleg diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus), lalu menugaskan Pansus untuk membahasnya. “Saya sangat memahami dan merasakan suasana kebatinan para advokat yang menolak ini,” katanya dalam pertemuan tersebut.

Di sisa waktu masa jabatan yang tinggal beberapa hari lagi, dari ratusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), baru 17 DIM yang dibahas. Para advokat juga mempertanyakan, apakah di sisa waktu yang sempit itu masih bisa membahas RUU ini. Di akhir pertemuan, delegasi advokat tersebut menyampaikan secara simbolis dokumen pernyataan dan memorandum kelompok advokat yang menentang pengesahan RUU Advokat. (mh) foto: andri/parole/jw.

Anggota DPR Perlu Pahami Konstituen



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung memberikan ucapan selamat kepada Anggota DPR baru

Anggota DPR mempunyai peran penting dalam menyerap dan mewujudkan harapan masyarakat di daerah pemilihan-nya atau konstituen. Peran ini membuat tanggung jawab sebagai anggota legislatif menjadi berbeda dengan jabatan lainnya.

Untuk meningkatkan kinerja representasi ini telah disiap-

kan sejumlah aturan dan perangkat pendukung lainnya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung saat menyampaikan paparan dalam Pembekalan Anggota DPR Periode 2014-2019 di Lemhannas, Jakarta, Kamis (11/9/14).

“Sistem sebelumnya membuat batasan antara anggota dewan dengan publik, sekarang dengan sejumlah penyesuaian dan didukung dana partisipasi, berintegrasi dengan masyarakat menjadi lebih baik,” kata politisi FPDIP ini.

Anggota DPR nantinya akan mendapat dukungan anggaran aspirasi, representasi serta tenaga ahli yang khusus bertugas di daerah pemilihan. Dengan kebijakan ini diharapkan wakil rakyat dapat memenuhi harapan publik yang luar biasa dalam sistem pemilu langsung.

Pada bagian lain Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang ini mengingatkan agar anggota dewan dapat belajar pada kesalahan periode lalu yang sebagian terjebak kejahatan korupsi. “Saya berharap saudara belajar dari kesalahan orang lain yang terjebak korupsi,” tekannya.

Anggota DPR terpilih Arsul Sani dari PPP menilai masukan

yang disampaikan Pramono sangat positif. “Penting memelihara komunikasi dengan konstituen, Pak Pram intinya mengingatkan kita musti pintar-pintar karena konstituen itu aspirasi dan permintaannya macam-macam, ada hal yang bisa kita penuhi ada hal yang tidak,” ujar dia.

Sementara itu Indra P. Simatupang dari PDIP mengatakan

penjelasan tersebut membantunya lebih awas menghadapi tantangan pekerjaan sebagai anggota DPR. “Itu yang jadi substansi pada hakekatnya sangat manusiawi kalau anggota dewan memikirkan dirinya dan keluarganya dulu baru selanjutnya yang lain. Itu yang saya ngeri, kita ini bukan manusia sempurna,” demikian Indra. (iky) foto: [odjie/parle/hr](#).



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung ikut barbaur dengan demonstran

Pimpinan DPR Temui Demonstran Penolak RUU Pilkada

Gabungan dari berbagai elemen masyarakat gelar demonstrasi di depan pintu gerbang DPR/MPR/DPD RI, Kamis (11/09). Mereka berorasi menolak RUU Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan oleh DPRD, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Pasalnya, menurut para demonstran, hal ini mengebiri kedaulatan rakyat.

Melihat hal ini, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung pun menemui para demonstran. Dari ruang kerjanya, ia langsung menuju ke pintu gerbang Kompleks Parlemen, dan naik ke atap mobil koordinator demonstrasi, untuk menemui dan menyambut antusias se-

luruh partisipan demonstran.

“Tolak RUU Pilkada melalui DPRD. Kita jangan kembali ke Orde Baru. Kita berjuang bersama demi kedaulatan rakyat. Lawan!” seru Pramono, sembari mendapat tepuk tangan dan pekatan “Tolak RUU Pilkada” dari seluruh demonstran.

Politisi PDI Perjuangan ini menanggapi pengaduan pendemo tersebut dan meminta kepada seluruh rakyat untuk berjuang bersama menolak RUU Pilkada. Ia juga meyakinkan para penolak RUU Pilkada ini, jika berjuang keras, maka aspirasi ini pasti didengar oleh

para Wakil Rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu koordinator demonstrasi menyerahkan dokumen yang berisi pernyataan dari masyarakat yang menolak RUU Pilkada. Tepuk tangan pun terdengar meriah ketika Pramono melenggang meninggalkan para demonstran.

Saat ini RUU Pilkada masih dibahas di tingkat Pansus dan dijadwalkan akan dibawa ke Sidang Paripurna/Pengambilan Keputusan pada tanggal 25 September mendatang. (sf) foto: [rizka/parle/hr](#).



Anggota Panja RUU Advokat Nudirman Munir menerima Organisasi Advokat pendukung disahkannya RUU Advokat menjadi Undang-undang, Rabu (10/9). Foto: Iwan Armanias/Parle/Iw.



Panja Aset BUMN Komisi VI DPR RI gelar rapat dengan Deputi BUMN, PT Hutama Karya, dan PTPN VIII, Kamis (11/9) Foto: Andri/Parle/Iw.



Pansus menyetujui RUU tentang Pemerintahan Daerah untuk disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 23 September mendatang. Kamis (11/9). Foto: Naefurodje/Parle/Hr.